

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Atok A. Rosyid, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
Malang: Setara Press, 2015.
- Amal Bakhrul, *Pengantar Wawasan Hukum di Indonesia* Yogyakarta: Thafa Media, 2021.
- Amal, Bakhrul. *Hukum dan Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*.
Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Ashiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang* Jakarta: Raja Grafindo Press, 2010.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* Jakarta:
Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Asshiddiqie Jimly, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*
Jakarta: KONSTITUSI PRESS, 2020.
- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca
Reformasi* Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP), 2007.
- Asshiddiqie Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan
Dalam UUD 1945* Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Asshiddiqie Jimly, *konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* Edisi Revisi;
Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Bernegara* Malang: *Setara Press*, 2015.
- Asshiddiqie Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* Jakarta: PT Bhuana
Ilmu Populer, 2009.
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta: PT. Raja
Grafindo, 2016
- Azhari Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum
Pidana, dan Hukum Islam* Jakarta: Kencana, 2012.
- Aziz Machmud, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem
Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstisusi* 7:5 (Juli 2010).
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PR Gramedia Pustaka,
2008), 360.
- Djazuli H.A., *Fiqih Siyasah* Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Djuyandi Yusa, *Pengantar Ilmu Politik* Jakarta: Rajawali Press, 2017.

- Fauzan Encik Muhammad, *Hukum Tata Negara Indonesia* Malang: Setara Press, 2017.
- Farida Maria, *Ilmu Perundang-undangan Yogyakarta: Kanisius*, 2021.
- Fauzan Encik Muhammad, *Hukum Tata Negara* Malang: Setara Press, 2016.
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern* Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ghafur Jamaludin, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold* Malang: Setara Press, 2019.
- Hosnah Ul, Asmak, Seno Wijanarko, Dwi dan P. Sibuea, Hotma, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021
- Huda Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review* Yogyakarta: FH UII Press, 2004
- Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Kencana, 2014.
- Kurniawan Mahendra, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Latif Yudi, *Negara Paripurna Historisitas Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila* Jakarta: PT Kompas Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Levy Leonard W., *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi* Bandung: Nusamedia, 2005.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2021.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Kencana, 2008.
- MD Mahfud, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- MD Mahfud, *Pilar-Pilar Demokrasi* Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010
- Muchtar Zainal Arifin, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta: Red & White Publishing, 2021.

Redi Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Saebani Beni Ahmad, Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.

Mustofa, Bisri *al-ibriz lima 'rafatil Qur'ani Aziz* Jawa Tengah: Menara Kudus.

Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, 2017.

B. Jurnal dan Skripsi

Abidin Muhammad Zainal, "Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Skripsi*, Universitas Airlangga, 2012.

Achmad Rofi, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Yudikatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

Ahmad Fadoliy, Politik Hukum Penerapan Presidential Treshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia, Skripsi Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2020

Asep Wijaya, Rosmini, Poppilea Erwinta, "Problematika Hukum Penerapan Presidential Treshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Risalah Hukum* (Juni 2020): 25-35.

Asshiddiqie Jimly, Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia: pergeseran keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi selama tiga masa demokrasi, 1945-1980-an (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993): 72-80.

Fadoliy Ahmad, "Politik Hukum Penerapan Presidential Treshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia." *Skripsi*, Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

- Hari, Dede Romi, "Analisis Yurdis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Treshold)." *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau , 2018.
- Jejen Muhammad, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2018 Perspektif Fiqih Siyasah." *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021.
- Mardiah Rayhan, Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mk Nomor 23/Puu-Xviii/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan." *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatra Utara Medan, 2020.
- Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2021
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Treshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Rechtsvinding* 11 : 1 (April 2022) : 157.
- Rayhan Mardiah, Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mk Nomor 23/Puu-Xviii/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2020
- Rofi Achmad, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Yudikatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2018
- Safa'at Ali, "Toetsingsrecht," *Majalah Konstitusi-Berita Mahkamah Konstitusi* 14:2 (Januari 2006): 89-95

- Saifulloh Putra Perdana Ahmad, “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential Treshold* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Kkonstitusi,” *Jurnal Rechtsvinding* 11 : 1 (April 2022) : 157
- Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial,” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3:1 (Maret 2014), 12.
- Syamsudin M., “Keadilan Prosedur dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan,” *Jurnal Yudisial* (April 2014) : 21
- Syhaury Taufiqurrohman, Muhammad Helmi Fahrozi, “Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (*Presidential Threshold*),” *Al-Wasath Jurnak Ilmu Hukum* 1:4 (April 2020) : 27-29.
- Wijaya Asep, Rosmini, Poppilea Erwinta, “Problematika Hukum Penerapan *Presidential Treshold* Dalam Pemilihan Umum di Indonesia,” *Risalah Hukum* (Juni 2020): 45-54

C. Website

- https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8573_169594.pdf “Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022” diakses pada tanggal 27 September 2022 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8573_1657169594.pdf “Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022” diakses pada tanggal 27 September 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otoriter> diakses pada 11 Juni 2022
- Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Arief Budiman pada saat penyelenggaraan Simulasi Nasional Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 (19/08/2017)
<https://infopublik.id/kategori/pemilu/345739/kpu-gelar-simulasi-rekapitulasi-manual?show> diakses pada tanggal 25 Februari 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Hasil Amandemen keempat UUD NRI 1945

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ketiga.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Referensi Lain

Draft Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Komisi II DPR Tahun 2020

Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 “Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*)”

Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022